



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah selesai disusun. LKjIP ini merupakan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu agenda besar reformasi birokrasi. Penyusunan LKjIP ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam memenuhi tuntutan perubahan tatanan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan telah disesuaikan dengan format LKjIP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal yang menjadi pokok bahasan dari penyajian LKjIP adalah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diukur dengan capaian substantif indikator kinerja sarannya. Sehingga informasi yang disajikan dalam LKjIP ini berusaha untuk mengungkapkan tentang kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi keberhasilan dan ketidakberhasilan atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Kami berharap penyusunan LKjIP ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kebumen, 8 Mei 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK..... vii

BAB I..... 8

PENDAHULUAN 8

1.1 Gambaran Umum Organisasi 8

1.2 Fungsi Strategis 13

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi 14

1.4 Tindak Lanjut Atas Hasil Laporan Evaluasi SAKIP 15

BAB II..... 18

PERENCANAAN KINERJA..... 18

2.1 Perencanaan Strategis 18

2.2 Perjanjian Kinerja 22

BAB III..... 24

AKUNTABILITAS KINERJA..... 24

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 24

3.2 Realisasi Anggaran..... 40

BAB IV 43

PENUTUP..... 43

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja 43

4.2 Permasalahan / Kendala 43

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang..... 43

LAMPIRAN 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Menurut Jabatan 11

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Menurut Golongan..... 12

Tabel 1. 3 Jumlah ASN menurut Pendidikan 13

Tabel 1. 4 Matrik Tindak Lanjut AKIP Internal Sekretariat Daerah..... 15

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Setda..... 19

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama 20

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Setda..... 22

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 22

Tabel 2. 5 Perencanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025..... 23

Tabel 3. 1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja26

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 202527

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja IKM Setda 2023 s.d. 202528

Tabel 3. 4 Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis30

Tabel 3. 5 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).....30

Tabel 3. 6 Perbandingan nilai masing-masing unsur IKM Sekretariat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 202531

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten/Kota Lain32

Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....35

Tabel 3. 9 Perbandingan Kebutuhan dan Realisasi SDM Tahun 202536

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program / Kegiatan Pendukung36

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 202540

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.. 10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan Realisasi IKM Kabupaten dan IKM Setda29

Grafik 3. 2 Perbandingan Nilai IKM Triwulan I s.d. IV Tahun 202529

BAB I

PENDAHULUAN

Maksud disusunnya LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, antara lain:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Sekretaris Daerah kepada Bupati dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara organisatoris kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

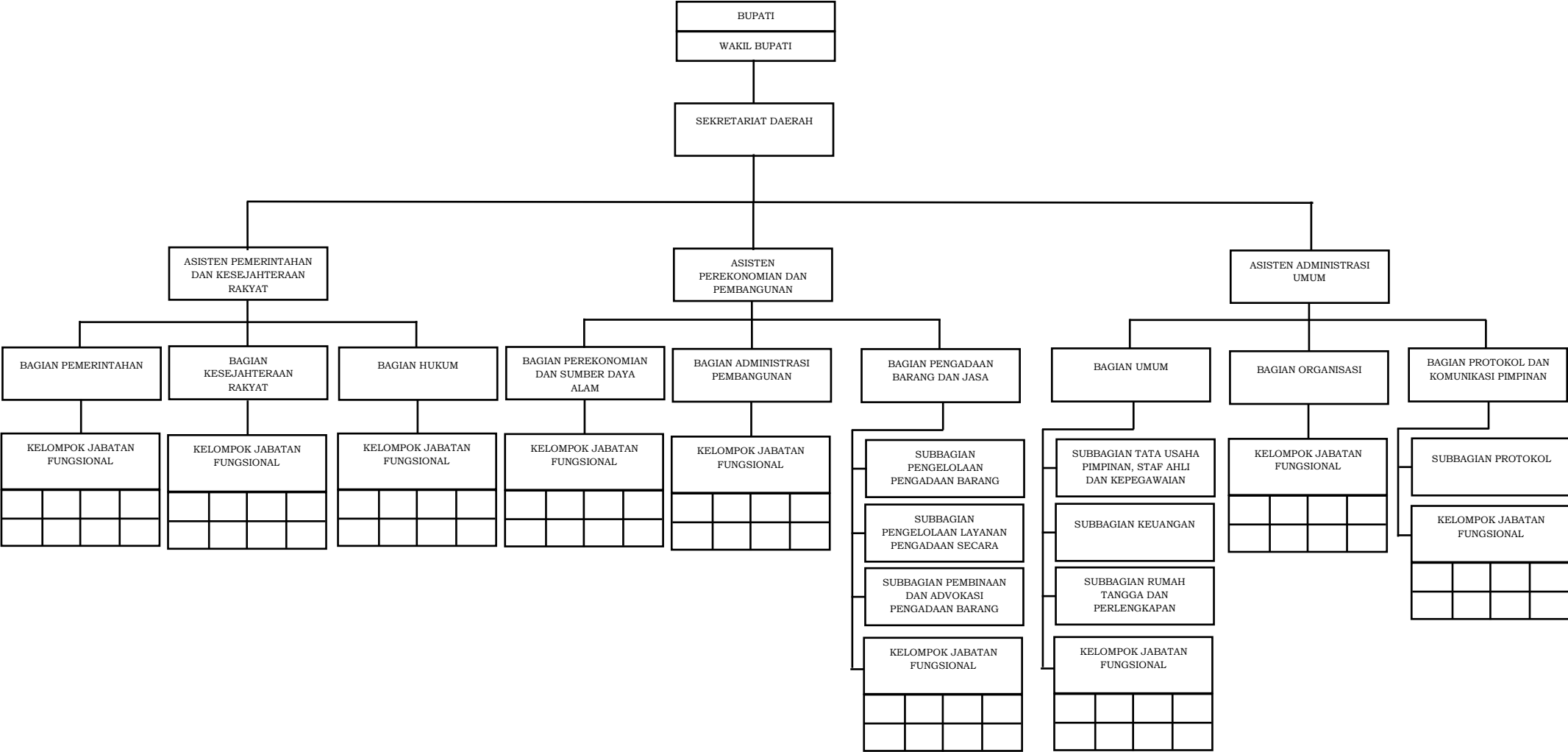
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;

- f. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;
- g. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai analisis kebutuhan struktur yang direncanakan sebagai berikut:

- 1. Sekretaris Daerah;
- 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c) Bagian Hukum
- 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan,
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
- 4. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - a) Bagian Umum,
 - b) Bagian Organisasi,
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

1.1.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

- a. Berdasarkan jabatan, jumlah ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah ASN Menurut Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1
4.	Asisten Administrasi Umum	1
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1
8.	Kepala Bagian Umum	1
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1
11.	Kepala Bagian Pemerintahan	1
12.	Kepala Bagian Hukum	1
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1
14.	Kepala Bagian Organisasi	1
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	1
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1
17.	Kepala Subbagian Keuangan	1
18.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	1
20.	Kepala Subbagian Protokol	1
21.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1
22.	Ajudan	1
23.	Analisis Advokasi Hukum	1
24.	Analisis Hukum Ahli Pertama	3
25.	Analisis Infrastruktur	1
26.	Analisis Jabatan	1
27.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
28.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	13
29.	Analisis Kesejahteraan Rakyat	3
30.	Analisis Pemerintahan Daerah	1
31.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1
32.	Analisis Perekonomian	3
33.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
34.	Analisis Protokol	1
35.	Analisis Publikasi	1
36.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2
37.	Arsiparis Terampil	3
38.	Bendahara	2
39.	Fasilitator Pemerintahan	2
40.	Operator Layanan Operasional	2
41.	Penata Kelola Pemerintahan	2
42.	Penata Layanan Operasional	1
43.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1
44.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	4
45.	Pengadministrasi Pemerintahan	1
46.	Pengadministrasi Perkantoran	1

No.	Nama Jabatan	Jumlah
47.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
48.	Pengadministrasi Umum	20
49.	Pengelola Akuntansi	1
50.	Pengelola Bantuan Hukum	1
51.	Pengelola Keuangan	1
52.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
53.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	1
54.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	4
55.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	17
56.	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1
57.	Pengelola Urusan Agama	1
58.	Pengemudi	2
59.	Pengolah Data Informasi dan Hukum	1
60.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	2
61.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1
62.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1
63.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	2
64.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	2
65.	Perencana Ahli Pertama	1
66.	Pramu Bakti	3
67.	Penata Keprotokolan	2
68.	Pranata Hubungan Masyarakat (CJFT)	1
69.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
70.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2
71.	Pranata Jamuan	2
72.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
73.	Teknisi Listrik dan Jaringan	2
74.	Verifikator Keuangan	1
	Jumlah	159

Sumber: Bagian Umum Setda Kebumen, 2025

- b. Berdasarkan golongan, jumlah ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah ASN Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	19
2.	III	111
3.	II	16
4.	I	1
5.	IX	9
6.	VII	1
7.	V	2
	TOTAL	159

Sumber: Bagian Umum Setda Kebumen, 2025

- c. Berdasarkan Pendidikan, jumlah ASN yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah ASN menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	26
2.	S1	100
3.	D3	6
4.	SMA/SMK	25
5.	SMP	1
6.	SD	1
	TOTAL	159

Sumber: Bagian Umum Setda Kebumen, 2025

Dengan struktur organisasi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berupaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan melalui LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini mampu memberikan gambaran dan informasi yang transparan mengenai kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2025

1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen fungsi strategis Sekretariat Daerah (Setda) Kebumen adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, koordinasi antar-perangkat daerah (OPD), pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administrasi dan pembinaan ASN, menjadikannya pusat administrasi dan penggerak koordinasi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif sesuai visi misi daerah, termasuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dilihat potensi ASN di Sekretariat Daerah tahun 2025 sebanyak 159 pegawai dengan komposisi pendidikan paling tinggi adalah berpendidikan S1 sebanyak 63%. Sebanyak 82% ASN sudah bergolongan III ke atas. Hal ini menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai telah mendukung analisis beban kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja sudah memadai namun perlu penyesuaian software dan hardware perangkat pendukung kerja berupa laptop dan PC komputer dengan teknologi informasi 5.0. Hal ini digunakan untuk menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah permasalahan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2025 dapat diidentifikasi pada tabel di bawah ini :

1. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja
2. Masih rendahnya fasilitasi pondok pesantre dan Lembaga keagamaan
3. Masih rendahnya kualitas implementasi kebijakan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan
4. Masih lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
5. Masih kurangnya koordinasi dan sinergi antar PD
6. Masih kurangnya pengendalian internal dan manajemen Risiko
7. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi IKM
8. Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan

Permasalahan utama yang dihadapi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengawal dan selaras dengan kebijakan nasional sehingga pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dapat terwujud sebagaimana tujuan dari reformasi birokrasi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik telah dilakukan, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti terkait

- mindset budaya kinerja, untuk itu perlu persamaan persepsi pimpinan dan kebijakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
2. Tuntutan Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu di era digital saat ini semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat. Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat yang cepat menjadi sangat penting. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemerintah serta dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara umum kondisi pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini terlihat bahwa masih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Kabupaten Kebumen belum optimal diantaranya standarisasi pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen belum berjalan dengan baik. Untuk itu perlu keselarasan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

1.4 Tindak Lanjut Atas Hasil Laporan Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.Kin/23/4/2025 tanggal 05 Agustus 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tersebut. Dokumen laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut laporan hasil evaluasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. 4
Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP Internal
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Pohon Kinerja belum spesifik menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Terlampir pada link: http://tinyurl.com/TLAKIPSETDA25
2.	Terdapat beberapa kekeliruan dalam penulisan tahun pada	Meningkatkan kualitas penyusunan Renja dengan lebih cermat dalam penulisan tahun	Melaksanakan penajaman penyusunan Renja bersama seluruh bagian di lingkungan	Terlampir pada link: http://tinyurl.com/TLAKIPSETDA25

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	Renja dan Rancangan RKPD		Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	
3.	Belum semua bagian melaksanakan monev kinerja secara berkala	Meningkatkan kualitas dan kepatuhan monev kinerja secara berkala setiap triwulan sampai dengan masing-masing bagian	Koordinasi kepada seluruh bagian untuk melaksanakan monev kinerja secara berkala	Terlampir pada link: http://tinyurl.com/TLAKIPSETDA25
4.	Beberapa bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen belum semua menunjukkan kepatuhan dalam mengunggah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi ke dalam aplikasi e-semarak dan e-sakip	Meningkatkan kualitas dan kepatuhan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sampai dengan masing-masing bagian	Koordinasi kepada seluruh bagian untuk melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Terlampir pada link: http://tinyurl.com/TLAKIPSETDA25
5.	Indikator Kinerja Utama Setda belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja bagian	Memilih dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Setda yang cukup mampu untuk mengukur keseluruhan kinerja bagian-bagian	Menyusun Indikator Kinerja Utama Setda sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Terlampir pada link: http://tinyurl.com/TLAKIPSETDA25
6.	a. Hierarki sub bab pada LKjIP belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017	Meningkatkan kualitas dan kepatuhan atas format penyusunan laporan kinerja (LKjIP) dengan menpedomani Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017	Penyusunan LKjIP untuk tahun yang akan datang mengacu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 dan lebih memperhatikan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan	
7.	b. Belum terdapat analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja secara mendalam	Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi atas analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja secara mendalam	memperhatikan Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang lebih mendalam serta menyingkrongkan antara Strategi Peningkatan Kinerja dengan permasalahan/ kendala yang dihadapi	
8.	c. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya belum dilakukan secara mendalam	Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya belum		
	d. Strategi Peningkatan Kinerja pada BAB IV Penutup belum			

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	menjawab atas permasalahan/ kendala yang dihadapi	dilakukan secara mendalam.		
9.		Menyingkrongkan antara Strategi Peningkatan Kinerja dengan permasalahan/ kendala yang dihadapi		
10.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara mendalam	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam dengan menjadikan hasil evaluasi internal dijadikan dasar perbaikan dalam perencanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya	Koordinasi kepada seluruh bagian untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Terlampir pada link: http://tinyurl.com/TLAKIPSETDA25

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis yang disusun Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mendasari pada visi, misi Bupati yang kemudian dituangkan dalam tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

1. Visi

Visi Kabupaten Kebumen adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

2. Misi

Misi Kabupaten Kebumen ada 5 (lima) yaitu:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan Masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermatabat

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengampu misi keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, ngayemi dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik.

3. Tujuan dan Sasaran

Berpijak pada rumusan Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, maka penjabaran Tujuan dan Sasaran Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Setda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Akhir Renstra
				Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,97	82,5	83	84	85	85,5	86	86
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,97	82,5	83	84	85	85,5	86	86

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan rumusan Indikator Kinerja Utama Setda telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Adapun rumusannya sebagai berikut

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Dana)	DEFINISI OPERASIONAL
Tujuan				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran: Berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan.
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Formulasi Pengukuran: Berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Dana)	DEFINISI OPERASIONAL
			4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen	berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Setda

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Akhir Renstra
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,97	82,5	83	84	85	85,5	86	86

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target
	Tujuan:					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	85,5
	Sasaran:					
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	85,5

Untuk melaksanakan target kinerja di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen didukung program dan anggaran belanja sebagai berikut

Tabel 2. 5
Perencanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.235.780.223
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 16.408.579.344
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.426.912.124

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat capaian Sasaran yang merupakan tingkat capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan yang diukur dari hasil capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatankegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. 1

Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65% sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d. 60%	Kurang (K)
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan melalui reviu internal pada Hari Rabu Tanggal 7 Januari 2026 dan diikuti oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan tim penyusun LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025



Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen dapat di lihat pada link <https://bit.ly/LKjIPSetda2025>

1. Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan target dan realisasi kinerja Tahun 2025. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	91,71	107,26%
	Sasaran:				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	85,5	89,91	105,16%

Berdasarkan Tabel 3.2, capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen diperoleh nilai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,71 dan 89,91 untuk lingkup Setda. Selanjutnya, capaian kinerja dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, yaitu sebesar 85,5. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa capaian kinerja masing-masing sebesar 107,26% dan 105,16%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Data capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Responden dalam survei ini adalah masyarakat dan pemangku kepentingan yang menerima layanan dari Sekretariat Daerah sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan, yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Nilai tersebut kemudian dikonversikan

menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat dalam skala 0–100 Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan, yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Nilai tersebut kemudian dikonversikan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat dalam skala 0–100

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini:
Perbandingan Capaian Kinerja IKM Setda 2023 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Perbandingan Capaian Kinerja IKM Setda 2023 s.d. 2025

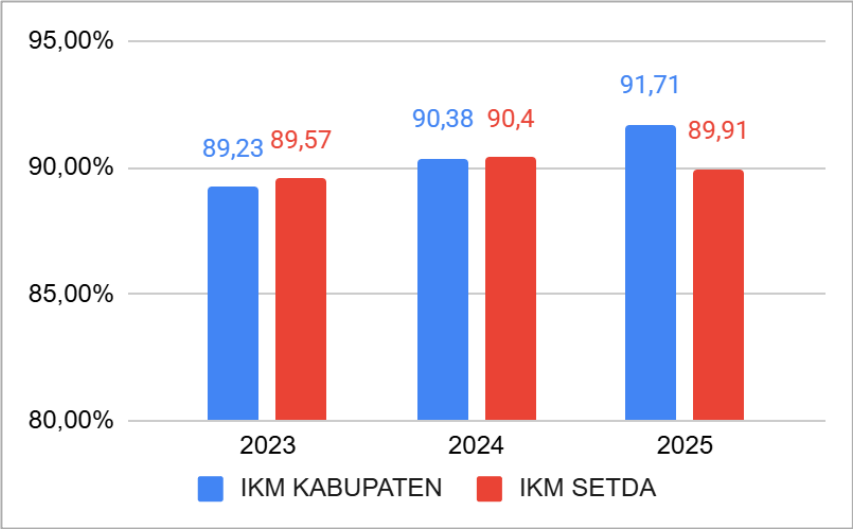
No	Tujuan / Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun								
			2023			2024			2025		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Tujuan										
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	89,23	106,23%	85	90,38	106,33%	85,5	91,71	107,26%
	Sasaran										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	84	89,57	106,63%	85	90,40	106,35%	85,5	89,91	105,16%

Keterangan:
T=Target

R=Realisasi
C=Capaian

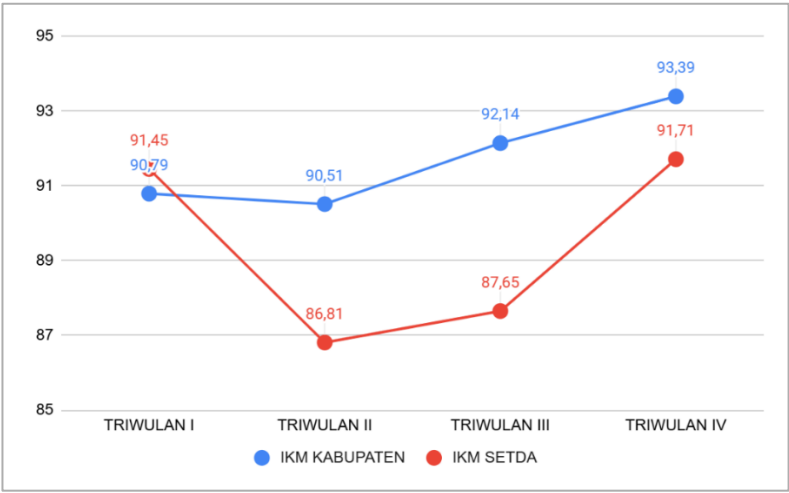
Berdasarkan tabel di atas perbandingan capaian kinerja dan realisasi IKM Setda tahun 2023 s.d. 2025 mengalami penurunan.

Sedangkan Perbandingan realisasi IKM Setda dengan realisasi IKM Kabupaten Kebumen tahun 2023 s.d. 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3. 1 Perbandingan Realisasi IKM Kabupaten dan IKM Setda

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kabupaten Kebumen dengan IKM Sekretariat Daerah dari Triwulan I s.d. IV Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3. 2 Perbandingan Nilai IKM Triwulan I s.d. IV Tahun 2025

IKM triwulanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada Triwulan II dan III lebih rendah jika dibandingkan dengan IKM Kabupaten Kebumen, akan tetapi pada Triwulan I IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen lebih tinggi dari pada IKM

Kabupaten Triwulan I Tahun 2025 dan realisasi akhir IKM Setda diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

3. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.4:

Tabel 3. 4
Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,40	85,5	89,91	105,16%	86	104,55%

Realisasi IKM tahun 2025 (89,40%) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (90,40%) sehingga capaian kinerja IKM tahun 2025 sebesar 105,16% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 104,55%.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6
Perbandingan nilai masing-masing unsur IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Setda		Nilai Kabupaten	
		Nilai	Kinerja UPP	Nilai	Kinerja UPP
1	Persyaratan	91,35	Sangat Baik	93,91	Sangat Baik
2	Prosedur	91,95	Sangat Baik	93,68	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	90,27	Sangat Baik	92,50	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	96,55	Sangat Baik	98,05	Sangat Baik
5	Produk Layanan	91,34	Sangat Baik	93,91	Sangat Baik
6	Kompetensi Layanan	91,77	Sangat Baik	93,89	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	92,46	Sangat Baik	94,25	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	91,00	Sangat Baik	92,87	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	97,03	Sangat Baik	96,77	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, seluruh unsur pelayanan memperoleh kategori “Sangat Baik”. Nilai **Unsur Persyaratan** sebesar **91,35** menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan dinilai jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit oleh Masyarakat. Nilai **Unsur Prosedur** sebesar **91,95** menggambarkan bahwa alur dan mekanisme pelayanan telah sederhana, transparan, serta mudah diikuti oleh pengguna layanan. Nilai **Unsur Waktu Pelayanan** sebesar **90,27** Menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian layanan sudah baik, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal kecepatan pelayanan. Nilai **Unsur Biaya/Tarif sebesar 96,55** mengindikasikan bahwa biaya pelayanan dinilai sangat transparan dan sesuai ketentuan, bahkan menjadi salah satu unsur dengan nilai tinggi. Nilai **Unsur Prosedur Layanan** sebesar **91,34** menunjukkan bahwa hasil layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar dan kebutuhan Masyarakat. Nilai **Unsur Kompetensi Pelaksana** sebesar **91,77** menggambarkan bahwa petugas memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam memberikan pelayanan. Nilai **Unsur Perilaku Pelaksana** sebesar **92,46** menunjukkan bahwa sikap dan perilaku petugas dinilai ramah, sopan, dan responsif terhadap masyarakat. Nilai **Unsur Sarana dan Prasarana** sebesar **91,00** mengindikasikan bahwa fasilitas pendukung pelayanan sudah memadai, meskipun masih dapat ditingkatkan untuk kenyamanan pengguna layanan. Nilai **Unsur Penanganan Pengaduan** sebesar **97,03** menjadi unsur dengan nilai tertinggi,

menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan telah berjalan sangat baik, responsif, dan solutif.

Dari sembilan unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** adalah **Penanganan Pengaduan** dengan nilai **97,03**, diikuti oleh **Biaya/Tarif** sebesar **96,55**. Tingginya nilai pada unsur ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pengaduan telah berjalan responsif, serta transparansi dan kepastian biaya layanan telah dirasakan baik oleh masyarakat.

Sementara itu, **unsur dengan nilai terendah** adalah **Waktu Pelayanan** dengan nilai **90,27**, meskipun masih berada pada kategori “Sangat Baik”. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Produk Pelayanan.

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain.

Tabel 3. 7

Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Kabupaten Nganjuk	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(4/5*100)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,71	89,34	102,65

Berdasarkan Tabel 3.7 perbandingan capaian dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota lain, perbandingan capaian adalah dengan Kabupaten Nganjuk. Nilai IKM Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 memperoleh nilai IKM sebesar **91,71**, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk sebesar **89,34**, sehingga persentase capaian mencapai **102,65%**.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis **kegagalan** dari unsur penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Unsur waktu Pelayanan : Masih terdapat pelayanan yang belum dapat diselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan akibat tingginya volume pelayanan, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya pendukung.
- b. Unsur Sarana Prasarana : Masih terdapat sarana dan prasarana pelayanan yang belum optimal dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- c. Unsur Produk Layanan : Masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat baik dari sisi kualitas maupun kemudahan pelayanan.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

- a. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mensosialisasikan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK terutama nilai budaya kerja berorientasi pelayanan
- b. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta mengusulkan pengadaan
- c. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah melaksanakan review terhadap jenis layanan pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

Untuk mengetahui tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, perhitungan tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Berikut rumus perhitungan tingkat efisiensi dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Capaian Tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dan anggar tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumus diatas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 11,15%. Berdasarkan rentang nilai efisisensi (-20% sampai dengan 20%), capaian tersebut termasuk **inefisiensi**.

Capaian efisiensi ini diperoleh dari selisih antara nilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran yang benar-benar digunakan, dibandingkan terhadap total nilai anggaran berbobot capaian keluaran. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dikategorikan **efisien**, karena mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan pemanfaatan anggaran secara hemat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Efisiensi penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menunjukkan adanya perencanaan dan pengendalian anggaran yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan refocusing dan penyesuaian belanja pada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung prioritas daerah serta optimalisasi penggunaan anggaran. Melalui refocusing tersebut, pelaksanaan kegiatan tetap diarahkan pada pencapaian target kinerja prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah, sehingga target indikator kinerja tetap dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tabel 3. 8

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	85,5	91,71	107,26%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	85,5	89,91	105,16%	57.071.271.691	54.371.774.559	94,01	11,15%

Berdasarkan Tabel 3.7, capaian kinerja pada sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terlihat dari realisasi indikator kinerja sebesar 89,91 dari target 85,5 atau mencapai 105,16%, yang berarti target kinerja telah terlampaui. Dari sisi anggaran, realisasi belanja sebesar Rp54.371.774.559 dari pagu anggaran Rp57.071.271.691 atau sebesar 94,01%. Adapun tingkat efisiensi sebesar 11,15% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia, sehingga penggunaan sumber daya dinilai cukup optimal dalam mendukung pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan selaras dengan kebutuhan organisasi menjadi hal yang sangat penting. Efisiensi pemanfaatan SDM diukur melalui kesesuaian antara jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan ideal berdasarkan formasi jabatan. Adapun perbandingan antara kondisi eksisting dan kebutuhan pegawai menurut kelompok jabatan disajikan pada tabel berikut.

Dilihat potensi ASN di Sekretariat Daerah tahun 2025 sebanyak 159 pegawai dengan komposisi pendidikan paling tinggi adalah berpendidikan S1 sebanyak 63%. Sebanyak 82% ASN sudah bergolongan III ke atas. Hal ini menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai telah mendukung analisis beban kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Tabel 3. 9

Perbandingan Kebutuhan dan Realisasi SDM Tahun 2025

No	Kelompok Jabatan	Pegawai Tersedia	Kebutuhan Ideal	Persentase
1.	JPT	7	7	100%
2.	Struktural	14	38	36,84%
3.	Fungsional	57	97	58,76%
4.	Pelaksana	94	150	62,67%
Jumlah		172	292	58,90%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi SDM di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen baru mencapai 58,90% dari kebutuhan ideal. Meskipun demikian, dalam melaksanakan 3 program, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 105,16%. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah SDM tidak menghambat secara signifikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program / Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,26%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	105,16%				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Setda	94,13%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi	98,67%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				keuangan perangkat daerah		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95,26%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,98%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	94,96%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83,35%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	93,43%	Menunjang
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	90,36%	Menunjang
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	90,03%	Menunjang
			Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	99,60%	Menunjang
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	86,25%	Menunjang
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EKPPD	98,15%	Menunjang
			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	98,77%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	98,15%	Menunjang
			Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	98,17%	Menunjang
			Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	95,41%	Menunjang
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	93,40%	Menunjang
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	98,45%	Menunjang
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	98,28%	Menunjang
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan melalui SPSE	90,87%	Menunjang
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitas Kebijakan Sumber Daya Alam	92,56%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 94,01% kategori Baik Sekali dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program / Kegiatan Pendukung Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, program dan kegiatan yang paling mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan public, antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan memiliki capaian sebesar 98,77%, meliputi kegiatan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, fasilitas pelayanan administrasi pemerintahan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa, fasilitas kerja sama daerah, serta koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaporan tata pemerintahan.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat memiliki capaian sebesar 98,15% meliputi fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, kepemudaan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat kegiatan koordinasi bantuan sosial dan hibah, dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki capaian sebesar 90,87% meliputi fasilitasi dan pelayanan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), pendampingan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perangkat daerah.
4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki capaian sebesar 90,36% meliputi penyediaan bantuan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menyajikan analisis penggunaan sumber daya Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari kegiatan–kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.2.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11

Realisasi Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Setda	85,5	89,91	105,16%	39.235.780.223	36.933.408.423	94,13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	100%	19.696.074.100	19.434.376.428	98,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	100%	111.730.039	106.437.375	95,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	4.476.058.350	3.848.464.049	85,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	64	733	1145,31%	4.419.538.000	4.196.739.348	94,96

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100%	3.587.663.000	2.990.184.466	83,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	127	252	198,43%	3.388.596.000	3.165.868.970	93,43
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12	12	100%	1.338.925.584	1.209.802.269	90,36
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12	12	100%	969.054.450	872.440.255	90,03
Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	4	4	100%	244.290.900	243.301.853	99,60
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8	8	100%	1.003.849.800	865.793.410	86,25
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EKPPD	3,29	3,5	106,38%	16.408.579.344	16.105.618.861	98,15
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	3	23	106,38%	358.588.500	354.161.087	98,77

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15	17	113,33%	15.677.732.253	15.387.043.584	98,15
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	3	3	100%	335.010.591	328.876.507	98,17
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	5	5	100%	37.248.000	35.537.683	95,41
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91	96,39	105,92%	1.426.912.124	1.332.747.275	93,40
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	3	3	100%	239.435.124	235.721.787	98,45
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2	2	100%	155.617.800	152.933.552	98,28
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan melalui SPSE	10	10	100%	648.290.000	589.074.962	90,87
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitas Kebijakan Sumber Daya Alam	3	3	100%	383.569.200	355.016.974	92,56
Jumlah					57.071.271.691	54.371.774.559	94,01%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan 85,5 dengan realisasi IKM sebesar 89,91 atau capaian kinerja sebesar 105,16% dengan kategori kinerja Baik Sekali.

Keterkaitan sasaran dan program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 94,01% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Setda dan dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,15%.

Realisasi IKM tahun 2025 (89,91%) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (90,40%) namun demikian masih ada beberapa unsur yang perlu perbaikan 3 (tiga) unsur nilai terendah diantaranya unsur Waktu Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Produk Layanan.

4.2 Permasalahan / Kendala

Adapun permasalahan / kendala dalam mencapai target dari indikator kinerja Sekretariat Daerah antara lain:

1. Belum semua operator mempublikasikan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada pada masing-masing bagian.
2. Standar pelayanan belum dipublikasikan secara maksimal.
3. Pelaksanaan kegiatan dan penempatan aliran arus kas anggaran belum tepat.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemerintah.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2025-2029, target indikator kinerja utama adalah Nilai EKPPD dan Indeks Fasilitasi Keagamaan. Guna mencapai target tersebut, diperlukan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pembangunan melalui penguatan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan

2. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) melalui penguatan perencanaan kinerja, peningkatan pengukuran dan evaluasi kinerja, dan optimalisasi pelaporan kinerja.
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta stakeholder melalui peningkatan komunikasi, kolaborasi, integrasi program dan kegiatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), efektif, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko melalui penguatan sistem pengawasan, identifikasi serta pengendalian risiko secara berkala.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis hasil evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penyempurnaan standar pelayanan, optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan melalui pemberian fasilitasi bantuan dan pembinaan, dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendukung pengembangan pendidikan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan terhadap 3 (tiga) unsur nilai terendah diantaranya (Waktu Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan Produk Layanan) sebagai berikut:

1. Mendorong seluruh bagian untuk melaksanakan dan mempublikasikan hasil SKM secara berkala melalui media informasi resmi.
2. Mengoptimalkan publikasi Standar Pelayanan pada media informasi yang mudah diakses masyarakat.
3. Melaksanakan pemantauan realisasi anggaran secara berkala sebagai upaya pengendalian kinerja keuangan.
4. Menyusun prioritas pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan.

Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan keterbatasan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 8 Mei 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos
54311 Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edi Rianto S.T., M.T.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj.Lilis Nuryani.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5	85,5				85,5
	Sasaran :								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,5	85,5				85,5

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.332.406.000,00	Rp. 39.235.780.223,00	
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 18.469.393.000,00	Rp. 16.408.579.344,00	
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.675.583.000,00	Rp. 1.426.912.124,00	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Setda	85,5	89,91	105,16%	39.235.780.223	36.933.408.423	94,13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	100%	19.696.074.100	19.434.376.428	98,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	100%	111.730.039	106.437.375	95,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	4.476.058.350	3.848.464.049	85,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	64	733	1145,31%	4.419.538.000	4.196.739.348	94,96

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	100%	3.587.663.000	2.990.184.466	83,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	127	252	198,43%	3.388.596.000	3.165.868.970	93,43
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12	12	100%	1.338.925.584	1.209.802.269	90,36
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12	12	100%	969.054.450	872.440.255	90,03
Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	4	4	100%	244.290.900	243.301.853	99,60

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8	8	100%	1.003.849.800	865.793.410	86,25
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EKPPD	3,29	3,5	106,38%	16.408.579.344	16.105.618.861	98,15
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	3	23	106,38%	358.588.500	354.161.087	98,77
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15	17	113,33%	15.677.732.253	15.387.043.584	98,15
Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	3	3	100%	335.010.591	328.876.507	98,17
Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	5	5	100%	37.248.000	35.537.683	95,41
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	91	96,39	105,92%	1.426.912.124	1.332.747.275	93,40
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitas pelaksanaan	3	3	100%	239.435.124	235.721.787	98,45

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	kebijakan perekonomian						
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2	2	100%	155.617.800	152.933.552	98,28
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui SPSE	10	10	100%	648.290.000	589.074.962	90,87
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	3	3	100%	383.569.200	355.016.974	92,56
Jumlah					57.071.271.691	54.371.774.559	94,01%



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Merdeka No.2 Gedung B Kompleks Setda
Kabupaten Kebumen